

ABSTRAK

Hubungan Islam dan negara di Indonesia adalah dua entitas yang sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia senantiasa terlibat dalam pergumulan, salah satu puncak pergumulan keduanya adalah Sidang Majelis Konstituante tahun 1956-1959. Sejak Sidang Konstituante persoalan tersebut menjadi berbobot nilai ideologis dan politis melebihi wacana akademi yang pada tahun 1950 sangat produktif, perdebatan Islam dan negara tersebut merupakan bagian dari perdebatan akademis, ini terlihat pada sekitar tahun 1930 antara Soekarno dengan Mohammad Natsir memperjuangkan politik untuk mengkonkritkan ide atau konsep suatu negara. Memperjuangkan Islam sebagai ideologi baru terjadi pada Sidang Majelis Konstituante dimana wakil Umat Islam mengalami kekalahan, dari hasil tersebut menimbulkan dampak bawahan yang tidak baik bagi hubungan negara dan Agama Islam dimasa yang akan datang.

Salah satu tokoh pemikir Islam yang mendukung sistem pemerintahan Indonesia supaya tidak diganti adalah KH. Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal dengan Gus Dur, Beliau merupakan intelektual yang tumbuh berkembang dilingkungan kaum tradisional yaitu kalangan Nahdatul Ulama (NU) tetapi gagasan tentang politik keagamaannya melampaui tokoh-tokoh pemikir modernis, diantara pemikirannya yang menonjol adalah pemikiran mengenai hubungan Islam dan Negara dan pluralisme agama. Meskipun Beliau tumbuh dan berkembang dilingkungan NU, yang *note bene* adalah orientasi pemikiran politiknya berkiblat kepada pemikiran para ulama klasik, semisal Al-Ghozali, Al-Mawardi, namun dalam relasi Islam dan negara Abdurrahman Wahid mampu menerapkan pemikirannya dengan tokoh-tokoh liberal lainnya.

Dalam skripsi ini akan membahas mengenai Islam dan negara dalam pandangan Abdurrahman Wahid dan bagaimana hubungan keduanya. Dalam skripsi ini akan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) dengan mengkaji data-data dari buku tulisan Beliau

Menurut Abdurrahman Wahid Islam seharusnya diimplementasikan sebagai sebuah etika sosial (*social ethics*) yang berarti Islam berfungsi sebagai *komplementer* dalam kehidupan bernegara profesi agama sebagai etika sosial juga merupakan salah satu alternatif untuk menghindarkan benturkan agama dengan modernisasi atau pembangunan bangsa.